



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ASISTENSI INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH MENUJU PEMERINTAH DIGITAL

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2022

bangga
melayani
bangsa

PROGRAM KERJA KEBIJAKAN SPBE

FASE TRANSFORMASI

Capaian

1. Peningkatan rata-rata indeks SPBE, tahun 2018: 1,98 (kurang) tahun 2019: 2,18 (cukup) tahun 2020: 2,26 (Cukup) tahun 2021: 2,24 (Cukup) dengan indikator penilaian baru, berprinsip keterpaduan nasional
2. Kenaikan 19 peringkat e-Government Development Index (UN), tahun 2018: 107, menjadi tahun 2020: 88
3. Penetapan berbagai kebijakan turunan Perpres SPBE

FASE TRANSFORMASI

- Terwujudnya **proses bisnis terintegrasi** melalui penerapan Arsitektur SPBE
- Terwujudnya **tematik layanan**
- Pemanfaatan **infrastruktur TIK Nasional Berbagi Pakai**
- **Peningkatan literasi digital** (Manajemen ASN Digital)

SMART Government

- Penerapan penuh **layanan digital publik dan administrasi pemerintahan nasional**
- Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial (**Data-Driven Government**)
- Mewujudkan konsep **Smart City** dengan pola kerja digital (**New Way of Working**) pada operasional di Kota Nusantara tahun 2024



PENGEMBANGAN TIK 4.0

PEMBANGUNAN TIK 4.0



SMART GOVERNMENT

PENGUATAN TATA KELOLA

PENGUATAN LAYANAN SPBE

PENGUATAN INFRASTRUKTUR SPBE

2020

2021

2022

2023

2024

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

ARSITEKTUR SPBE

(Enterprise Government Architecture)

- Kementerian Bappenas (domain data dan informasi),
- Kementerian Kominfo (domain aplikasi dan infrastruktur TIK),
- BSSN (domain keamanan informasi)
- Kementerian PANRB (domain proses bisnis dan layanan digital)

Target penerapan Arsitektur SPBE, untuk Instansi Pusat hingga tahun 2023 dan untuk Pemerintah Daerah hingga tahun 2024



NON-STANDARD

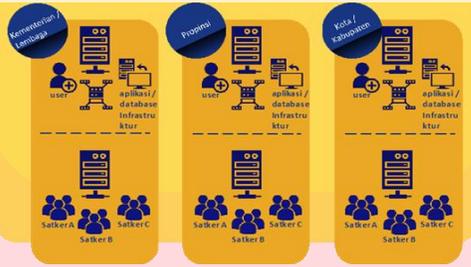
DUPLICATION

SILO

INTEGRATED GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES

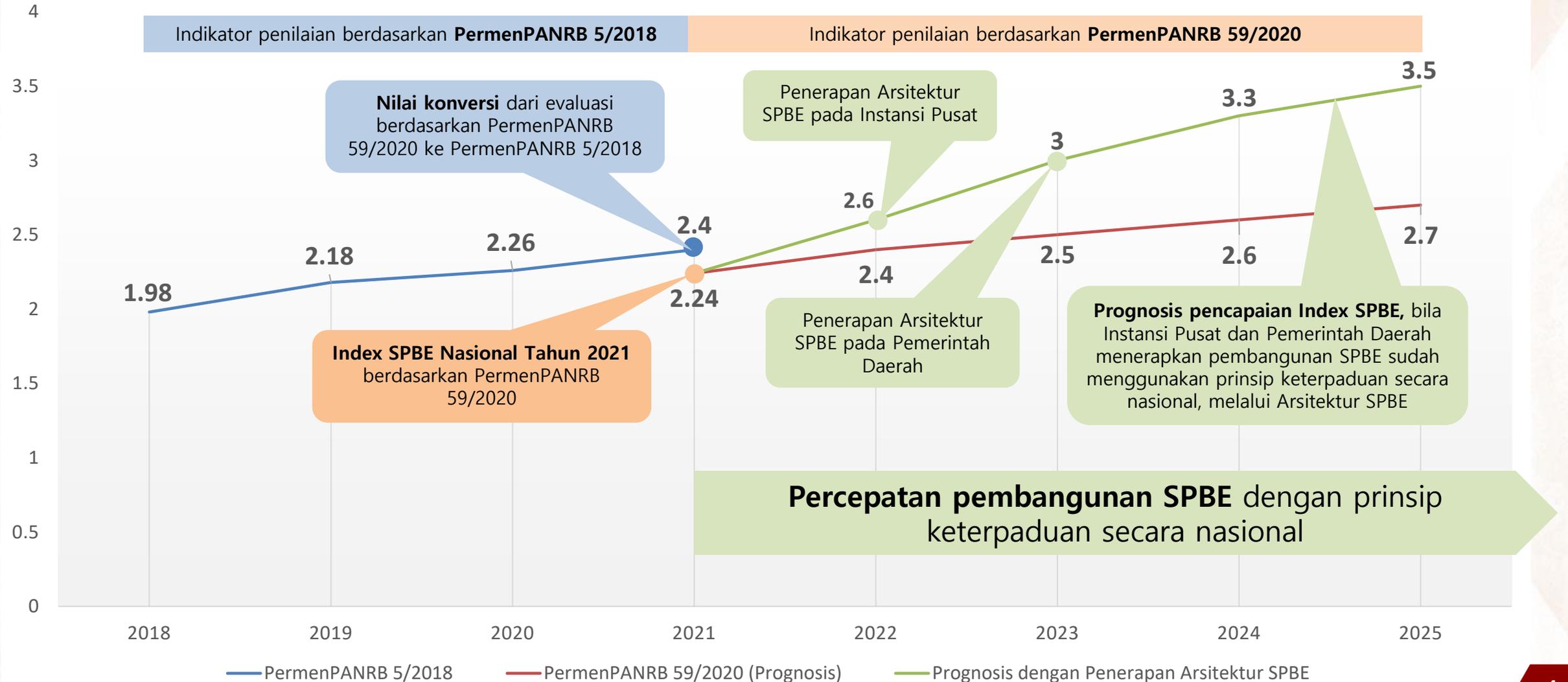
TRANSFORMASI DIGITAL

- 27.400 Aplikasi yang berpotensi duplikasi.*
- 2700 pusat data/ruang server.*
- Terjadinya pemborosan anggaran akibat terbangunnya sistem yang silo dan tidak terintegrasi mengingat setiap instansi membangun aplikasi pemerintahan sendiri.
- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif.



* Data Kementerian KOMINFO

PERKEMBANGAN PENERAPAN SPBE (INDIKATOR EVALUASI SPBE)





URGENSI ASISTENSI PENERAPAN SPBE PADA IPPD

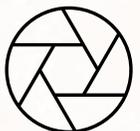
Asistensi penerapan SPBE merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan tujuan antara lain:



Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel



Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya



Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

ASISTENSI

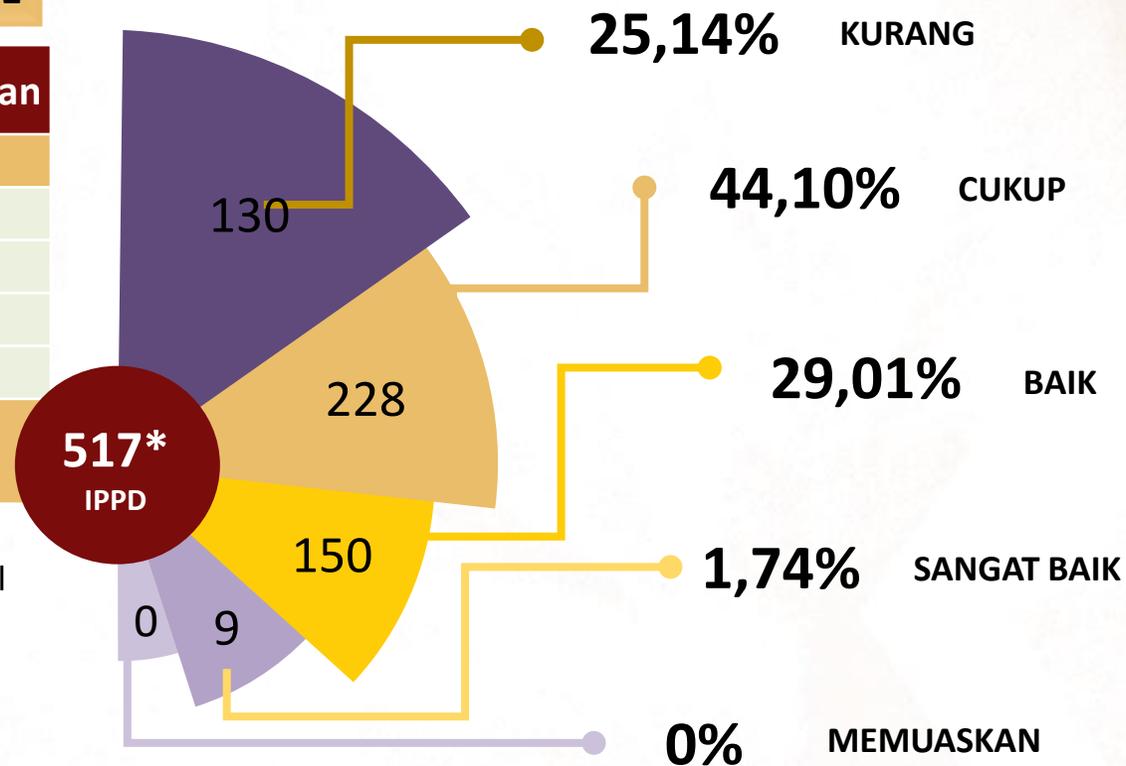
- ❖ Pelaksanaan asistensi penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) sebagai bagian dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- ❖ Mewujudkan target penerapan SPBE di Indonesia dengan predikat 'Baik'.

TINGKAT KEMATANGAN SPBE NASIONAL (2020 DAN 2021)

INDEKS SPBE NASIONAL

Deskripsi	2020 (PPANRB 5/2018)	2021 (PPANRB 59/2020)	Perbandingan
Indeks SPBE Nasional	2,26	2,24	- 0,02
Indeks Domain Kebijakan	2,07	2,21	0,14
Indeks Domain Tata Kelola	1,95	1,89	- 0,06
Indeks Domain Manajemen	-	1,23	1,23
Indeks Domain Layanan	2,48	2,81	0,33
Jumlah IPPD Berpredikat "Baik" atau lebih tinggi	256 IP (40,19%)	159 IP (30,75%)	- 97 IP (- 9,44%)

- Dari pelaksanaan evaluasi SPBE terhadap **517 IPPD**, Indeks SPBE Nasional Tahun 2021 adalah **2,24** dengan predikat "Cukup".
- Indeks SPBE Nasional menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di IPPD masih belum terstandar, dilaksanakan secara sendiri-sendiri (silo), belum tergambarakan keterpaduan/kolaborasi/integrasi antar IPPD.
- Pada Tahun 2022, Kementerian PAN RB melakukan **asistensi/bimbingan teknis, berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2021**, untuk perbaikan tingkat kematangan penerapan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



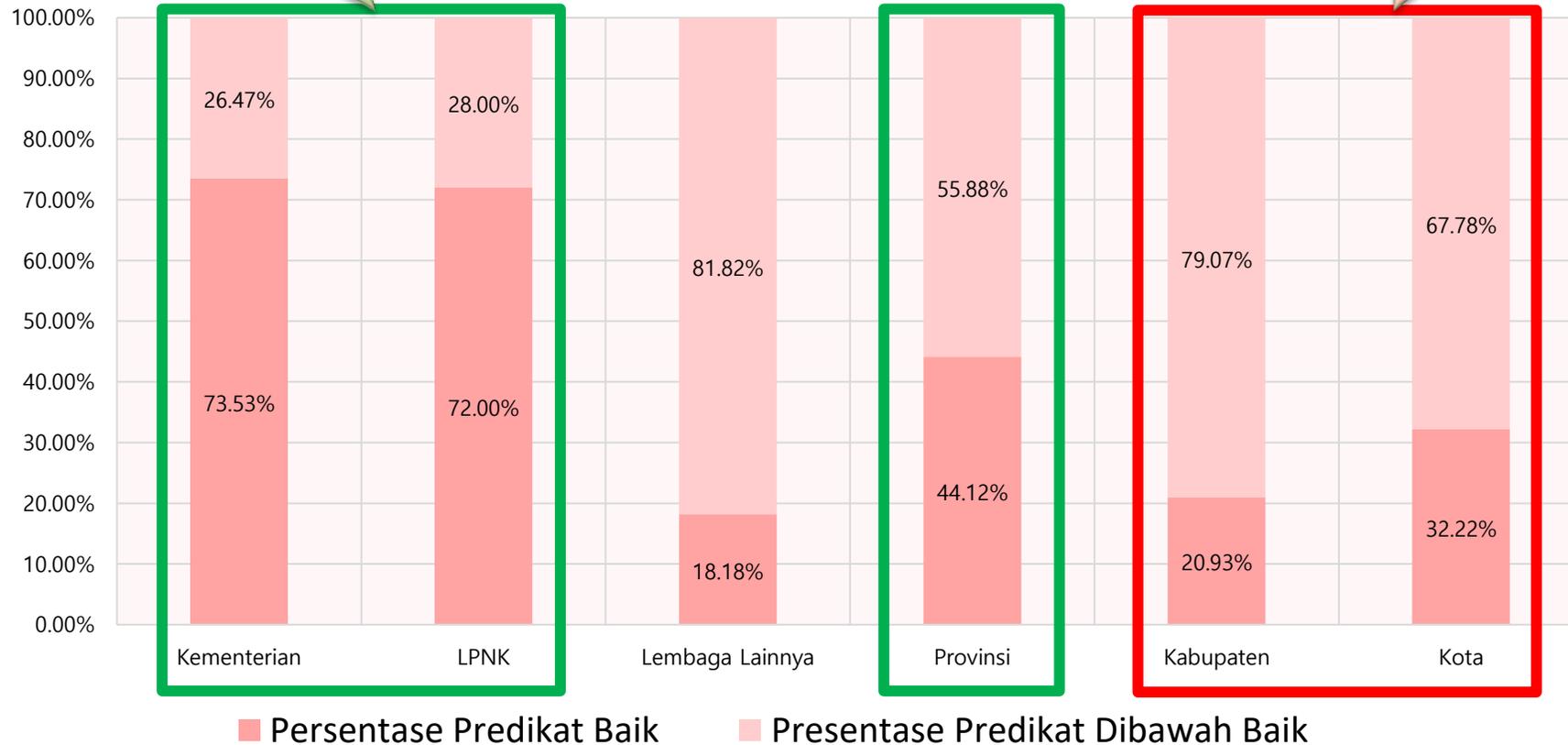
*) Masih terdapat 120 IPPD dari populasi yang belum di evaluasi tahun 2021

DISTRIBUSI NILAI INDEX SPBE NASIONAL (2021)

Fokus pada piloting arsitektur SPBE dan penerapan manajemen SPBE

Fokus pada pembinaan tingkat kematangan SPBE, sesuai hasil evaluasi SPBE 2021

Distribusi Nilai Indeks SPBE 517 IPPD Berdasarkan Predikat



Indeks SPBE Minimal Berpredikat Baik (Indeks $\geq 2,6$)



517 K/L/Pemda dievaluasi



159 IP (30,75%) dengan Predikat Baik



358 IP (69,25%) belum mencapai Predikat Baik

RPJMN 2020-2024

MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL



TUJUAN RB 2020-2024

RB GENERAL

BIROKRASI YANG BERDAYA SAING, BERSIH, DAN EFEKTIF MENDORONG PEMBANGUNAN NASIONAL

INDIKATOR RB GENERAL

- Indikator Kinerja pembangunan
- Persepsi Terhadap Kinerja dan Pelayanan
- Indeks Reformasi Birokrasi

RB TEMATIK

RB YANG MEMPERCEPAT PENANGANAN KEMISKINAN

INDIKATOR RB TEMATIK

- Angka Kemiskinan
- Daya Saing Global

SASARAN RB 2020-2024

RB GENERAL



Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah

- Nilai SPBE
- Skor Akuntabilitas Kinerja
- Skor New-SPIP
- Indeks Kelembagaan (tentative)



Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

- Nilai Budaya Organisasi (tentative)
- Indeks Profesionalitas ASN
- Indeks Pelayanan Publik

RB TEMATIK

RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan **kemiskinan** dan peningkatan **daya saing** Indonesia



Indikator:

- Indeks Tata kelola pengentasan kemiskinan
- Indeks Tata Kelola Peningkatan Daya Saing Indonesia



Terima kasih



kempanrb



kemenpanrb



Kementerian-PANRB

bangga
melayani
bangsa